Kemitraan Penggemukan Sapi Bali Berbasis Sumber Daya Lokal di Wilayah Lahan Suboptimal Nusa Tenggara Timur

(Partnership Program on Bali Cattle Fattening Based on Local Resources in the Suboptimal Land of Nusa Tenggara Timur)

Priyono¹ dan D Priyanto²

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59, Bogor 16128

² Balai Penelitian Ternak, PO Box 221, Bogor 16720
priyono.spt@gmail.com

(Diterima 17 Januari 2018 – Direvisi 15 Februari 2018 – Disetujui 5 Juni 2018)

ABSTRACT

Bali cattle is one of the Indonesian germplasm that well adapted to suboptimal areas including East Nusa Tenggara (NTT). Difficulties in accessing capital became one of the factors that hamper effort the development of Bali cattle in larger scale. One alternative to access capital is through partnership model of Bali cattle fattening based on local resources. Partnership model of Bali cattle fattening was initiated by village cooperative centre (*pusat koperasi unit desa* = PUSKUD) since 2002 in Kupang District, South Central Timor District, North Central Timor District, and Belu District. Profit sharing in this program is 70% for farmers and 30% for PUSKUD NTT. The partnership program has been performing well and growing rapidly. On the other hand, some problems occurred such as cattle death and forced sale due to lack of feed, especially during dry season. In its development, the partnership model has resulted in empowering farmers through increasing income and employment.

Key words: Partnership, Bali cattle, fattening, local resources, suboptimal area

ABSTRAK

Sapi Bali merupakan plasma nutfah asli Indonesia yang memiliki daya adaptasi yang baik pada lahan suboptimal. Sapi Bali banyak dikembangkan di lahan suboptimal diantaranya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesulitan dalam mengakses modal menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pengembangan sapi Bali dalam skala usaha yang lebih besar. Salah satu alternatif untuk membuka akses permodalan tersebut yaitu dikembangkannya kemitraan penggemukan sapi Bali berbasis sumber daya lokal. Pola kemitraan penggemukan sapi Bali di NTT diinisiasi oleh pusat koperasi unit desa (PUSKUD) sejak tahun 2002 di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Sistem kemitraan ini menerapkan pembagian sisa hasil usaha untuk peternak sebesar 70% dan PUSKUD NTT sebesar 30%. Program kemitraan tersebut telah berjalan dengan baik dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, di satu sisi juga masih terjadi kematian sapi dan sapi dijual paksa akibat kendala pakan terutama saat musim kemarau. Dalam perkembangannya, pola kemitraan tersebut telah berdampak positif terhadap pemberdayaan petani, dalam hal peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: Kemitraan, sapi Bali, penggemukan, sumber daya lokal, lahan suboptimal

PENDAHULUAN

Sapi Bali banyak dikembangkan di lahan suboptimal dimana sebagian besar lahan tersebut berupa lahan kering dengan curah hujan yang rendah. Pada beberapa tempat di Indonesia, lahan didominasi lahan kering beriklim kering (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017). Kondisi ini berdampak pada produktivitas pertanian yang relatif rendah karena lahan hanya ditanami pada musim hujan yang terbatas. Hal ini mendorong petani memelihara sapi potong untuk membantu menambah sumber pendapatan keluarga.

Keragaan sapi ditentukan oleh daya dukung wilayah, terutama ketersediaan pakan hijauan baik berupa rumput, leguminosa, maupun limbah pertanian/perkebunan (Priyanto 2016). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar lahannya berupa lahan kering dan musim hujan atau bulan basah pendek yaitu sekitar 3-4 bulan, sedangkan bulan kemarau/kering berlangsung panjang, yaitu antara 8-9 bulan (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017). Namun, NTT dikenal sebagai salah satu sentra ternak sapi potong di Indonesia yang didukung dengan areal lahan luas, namun lahan

pengembalaan banyak yang belum termanfaatkan. Luas area padang pengembalaan di NTT mencapai 832.228 ha berpotensi untuk mendukung pengembangan sapi dengan pola pemeliharaan ekstensif (Priyanto 2016). Pada tahun 2016, populasi sapi di NTT menempati urutan kelima dari populasi sapi potong nasional dengan populasi sebanyak 984.508 ekor (BPS 2017; Ditjen PKH 2017). Hal ini menjadikan perhatian pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan tingginya populasi sapi potong di kawasan NTT.

Sapi Bali merupakan bangsa sapi yang dominan di wilayah NTT dan hingga kini telah berkembang cukup pesat. Hal ini karena sapi Bali mampu beradaptasi pada kondisi iklim kering dengan persediaan pakan hijauan yang relatif rendah, namun masih mampu untuk bereproduksi. Jumlah kepemilikan sapi Bali di NTT bervariasi tergantung pada daya dukung fisik wilayah, iklim, tingkat produktivitas ternak, kemampuan tenaga kerja petani dan faktor keamanan (pencurian ternak) (Mullik & Jelantik 2009).

Dalam pengembangan sapi Bali, seringkali dihadapkan dengan kendala kapasitas modal petani yang masih relatif rendah. Kesulitan dalam mengakses modal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pengembangan skala usaha yang lebih besar. Salah satu alternatif untuk membuka akses permodalan bagi petani di NTT adalah dikembangkannya program kemitraan penggemukan sapi Bali berbasis sumber daya lokal. Makalah ini bertujuan untuk menelaah kinerja model kemitraan penggemukan sapi Bali berbasis sumber daya lokal di lahan suboptimal NTT dan dinamika serta perkembangannya sebagai langkah pemberdayaan ekonomi peternak sapi potong.

GAMBARAN UMUM POLA KEMITRAAN

Pola kemitraan usaha pertanian dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan dan kerja sama

operasional agribisnis. Perbedaan pola kemitraan secara terperinci disajikan pada Tabel 1.

Program kemitraan dilaksanakan agar kedua belah pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya dapat terjadi kondisi dimana manfaat dan/atau kerugian yang harus dihadapi baik oleh pihak inti maupun plasma. Dalam program kemitraan, manfaat yang diperoleh petani diantaranya input produksi, pembinaan dan permodalan dibantu oleh pihak inti, kapabilitas petani dalam penggunaan teknologi baru meningkat, mampu membantu dalam pemasaran produk dan risiko harga cenderung kecil. Sementara itu, kerugian-kerugian diantaranya harga produk tetap sesuai kontrak meskipun harga di pasar sedang meningkat, pihak inti dapat melakukan monopoli harga/produk pada waktu tertentu dan jika terjadi masalah manajemen dan pemasaran akan menghambat pembelian produksi yang dikontrak (Eaton & Shepherd 2001).

Pola kemitraan sapi Bali yang sebagian besar diterapkan di Indonesia termasuk di NTT adalah pola inti plasma melalui mekanisme sistem gaduhan. Program kemitraan ini merupakan upaya pengembangan sapi Bali melalui mekanisme kerja sama vertikal antara pihak inti dengan plasma. Pihak inti adalah perusahaan atau pemilik modal, sedangkan pihak plasma adalah peternak sapi Bali. Pola ini dilandasi dengan kerja sama antara kedua belah pihak untuk berbagi risiko, biaya dan manfaat. Aturan umum kemitraan bagi hasil dalam usaha sapi potong sebagian besar didasarkan pada kepercayaan satu sama lain dengan kesepakatan informal antara investor dan peternak menyangkut permodalan dan bagi hasilnya (Firmansyah et al. 2006). Pola kemitraan ini memberikan kontribusi dan dampak berupa manfaat dan keuntungan yang diperoleh bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan kegiatan, baik pihak inti maupun plasma terikat oleh perjanjian kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu kemitraan dan hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perusahaan inti dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan

Tabel 1. Pola kemitraan usaha pertanian

Jenis kemitraan	Pola kemitraan yang diterapkan
Inti plasma	Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi pada plasma
Subkontrak	Kelompok mitra (usaha kecil) memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra (usaha menengah atau usaha besar) sebagai bagian dari produksinya
Dagang umum	Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra
Keagenan	Kelompok mitra mendapatkan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra
Kerja sama operasional agribisnis	Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal atau sarana

Sumber: Kementerian Pertanian (1997)

perlu melakukan pembinaan terhadap peternak plasma. Pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kewirausahaan, membantu permodalan, mengadakan penelitian, pengembangan dan penyaluran teknologi, serta melakukan konsultasi dan temu usaha. Menurut Suryana (2009) dalam mencapai efisiensi usaha yang tinggi diperlukan pengelolaan usaha secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pola kemitraan sehingga memberikan keuntungan yang berkelanjutan.

Di NTT, penerapan pola kemitraan antara peternak sapi Bali dengan pihak inti diupayakan agar dilakukan secara seimbang. Pembinaan pihak inti terhadap plasma dilakukan dengan terarah dan konsisten. Melalui pendekatan kemitraan, diperoleh lima manfaat dari kemitraan sapi Bali yaitu: (1) Mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terlibat; (2) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak; (3) Meningkatkan efisiensi dan harmonisasi pihak yang bermitra; (4) Terjalinnnya kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat; dan (5) Terjaminnya stabilitas dan kontinuitas pendapatan pihak yang bermitra (Saptana & Ashari 2007).

PENGHEMUKAN SAPI BALI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI LAHAN SUBOPTIMAL

Sapi Bali telah dikenal sebagai rumpun sapi yang banyak dibudidayakan peternak di Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan rumpun sapi lainnya. Sapi Bali mampu beradaptasi dengan baik meskipun dipelihara di wilayah dengan lahan suboptimal yang terbatas ketersediaan pakannya. Bahkan, sapi Bali juga memiliki tingkat fertilitas dan persentase karkas yang cukup baik. Persentase karkas sapi Bali sebesar 50,95-54%, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Madura, Peranakan Ongole dan sapi komersial Australia (Matondang & Talib 2015). Berdasarkan keunggulan tersebut, saat ini sapi Bali banyak dipilih untuk dikembangkan pada lahan-lahan suboptimal, salah satunya di Provinsi NTT, yang mencapai 80% dari populasi yang ada (Talib et al. 2003). Sapi Bali sudah banyak menyebar di beberapa wilayah di Indonesia dan dilaporkan mampu memberikan kontribusi sebesar 26,92% untuk pemenuhan daging sapi nasional (Purwantho 2012).

Provinsi NTT telah dikenal sebagai penyuplai ternak ke kawasan konsumen di Pulau Jawa. Oleh karena itu, sapi Bali memiliki peranan yang penting bagi masyarakat di NTT, usaha ternak sapi Bali dapat dikatakan sebagai tumpuan ekonomi penduduk pedesaan karena usahatani tanaman pangan dan lainnya kurang menjanjikan sebagai akibat curah hujan yang rendah dan hari hujan yang pendek.

Sebanyak 59% petani di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara, Provinsi NTT memiliki sapi Bali sebanyak 2,4 ekor/KK (Diwyanto & Priyanti 2008). Hal ini didukung dengan potensi sumber daya lokal dan lahan yang luas untuk pengembangan sapi Bali. Namun demikian, pemeliharaan sapi di NTT ini sebagian besar masih menggunakan sistem usaha tradisional dengan produktivitas relatif rendah. Sapi Bali sebagian besar dipelihara secara ekstensif dengan cara digembalakan pada padang penggembalaan alam. Padang penggembalaan ini, jika dilakukan perbaikan dengan introduksi rumput dan leguminosa unggul, akan meningkatkan kapasitas tampungnya. Namun, jika padang penggembalaan tersebut tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada menurunnya ketersediaan pakan terutama musim kemarau. Hal ini dapat berdampak pada relatif rendahnya produktivitas akibat penurunan angka kelahiran, tingkat kematian pedet yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ternak sapi yang rendah. Sapi Bali mempunyai tingkat fertilitas yang baik meskipun kondisi tubuhnya kecil dan kurus, bahkan pada umumnya sapi Bali dapat beranak setiap tahun. Dalam upaya pengembangannya diperlukan pembinaan dan penyuluhan pada peternak untuk meningkatkan kemampuan secara teknis dan manajerial agar peternak mampu mengadopsi upaya peningkatan performans sapi yang dipelihara (Hadi et al. 2002).

POLA KEMITRAAN PENGHEMUKAN SAPI BALI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Pola kemitraan inti plasma

Pola kemitraan penggemukan sapi Bali di NTT diinisiasi oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang mulai melakukan pengembangan pola kemitraan penggemukan sapi Bali berbasis pakan lokal pada tahun 2002 (Hanifah & Diwyanto 2012). Dalam pola kemitraan ini, PUSKUD berperan sebagai pihak inti dan peternak sebagai pihak plasma sesuai dengan SK Mentan Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian (Kementerian Pertanian 1997). Pola kemitraan ini pada prinsipnya sama dengan pola kemitraan lain (sistem paron) yang berkembang di masyarakat, namun program ini sejak awal dirancang agar petani memperoleh keuntungan yang optimal. Sistem paron telah ada sejak 1970an (Wirdahayati 2010).

Pola kemitraan ini dirintis dengan adanya bantuan hibah modal dari *National Cooperative Business Association* (NCBA), *United State Department of Agricultural* (USDA). Pola kemitraan telah dilakukan mulai tahun 2002 di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Belu. Pusat koperasi unit desa bermitra dengan investor penyedia kredit

untuk pengadaan sapi bakalan yang akan dibesarkan serta untuk biaya-biaya operasional pendukung lainnya. Petani berperan sebagai pihak plasma yang berkewajiban menyiapkan kandang sederhana dan melakukan pemeliharaan sapi potong sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat. Program pengembangan yang dilakukan adalah melalui kegiatan pola penggemukan sapi Bali yang dilakukan oleh peternak dan pihak PUSKUD sebagai pihak inti. Sapi yang telah dipelihara tersebut, saat sudah mencapai bobot hidup tertentu, PUSKUD mencari pembeli yang bersedia membayar dengan harga jual sesuai dengan harga pasar. Dengan meningkatnya skala usaha sapi yang dipelihara dan semakin membaiknya pendapatan akan berpengaruh pada kemampuan pengembalian kredit peternak mengakses terhadap tambahan modal untuk pengembangan usaha (Mayangsari et al. 2014). Pemberian kredit dalam bentuk sapi bakalan mampu mendorong peningkatan produktivitas, perluasan skala usaha dan peningkatan pendapatan (Nalle 2014). Pola kemitraan inti dan plasma di NTT dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pola kemitraan inti dan plasma di NTT

Pihak inti (PUSKUD) memiliki staf (karyawan) dalam upaya pembinaan dan bimbingan terhadap peternak yang tergabung dalam plasma (Gambar 1). Kewajiban dan hak PUSKUD meliputi sosialisasi program sistem paron, verifikasi lapangan, menyediakan ternak sapi bakalan dan mengganti akibat kematian dan kehilangan ternak sapi yang dilaporkan peternak dalam 1×24 jam serta berhak menerima sisa hasil usaha (SHU) sebesar 30% (Budiarsana et al. 2013). Sedangkan kewajiban dan hak peternak meliputi pembentukan kelompok ternak, menyediakan sarana dan prasarana untuk kelengkapan penggemukan, memelihara ternak sesuai dengan perjanjian, kewajiban mengganti jika tidak melaporkan kematian atau kehilangan dalam waktu 1×24 jam dan berhak menerima SHU sebesar 70%. Dalam usaha penggemukan sapi potong pola gaduhan perlu dilakukan evaluasi kelayakan usaha sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas usaha (Zulfanita et al. 2009).

Dalam pola kemitraan ini, posisi dan peran inti plasma dituangkan dalam kontrak kerja sama lebih rinci, kemudian disosialisasikan kepada seluruh plasma yang terlibat. Aturan bagi hasil memberikan porsi dari keuntungan bersih sebesar 70% untuk plasma dan 30% adalah hak inti. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan transparan, akurat, jujur, adil dan konsisten. Bahkan, agar pelaksanaan kemitraan inti plasma dapat dilakukan dengan baik maka *law enforcement* harus diterapkan dengan baik dan *reward and punishment* agar dilakukan secara tegas (Diwyanto & Priyanti 2008; Hanifah & Diwyanto 2012). Setelah program berjalan lebih dari 10 tahun, kegiatan penggemukan sapi Bali berbasis pakan lokal di NTT ini masih terus berjalan walaupun mengalami pasang surut dalam realisasi pelaksanaannya. Dalam kurun waktu 2002-2014 perkembangan jumlah peternak semakin meningkat. Hal tersebut terlihat pada jumlah koperasi peternak sebanyak 183 unit dengan jumlah anggota sebanyak 4.881 orang. Koperasi peternak tersebut sebesar 47,54% berada di Kabupaten Kupang, 32,24% berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan; 13,11% berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan 7,10% berada di Kabupaten Belu.

Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan kemitraan plasma inti dilakukan melalui pemberian kuasa penuh dari mitra penyedia dana kepada PUSKUD untuk melakukan kegiatan pengembangan peternakan melalui usaha penggemukan. Lembaga mitra penyedia dana melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana supaya modal yang telah diberikan untuk pengembangan penggemukan sapi dapat bertahan lama dan berkelanjutan.

Kinerja dan kendala program kemitraan

Jumlah sapi yang dijual hasil pola kemitraan penggemukan sapi Bali merupakan indikator keberhasilan kinerja dari kegiatan usaha penggemukan. Pusat koperasi unit desa menetapkan tunda potong dengan batasan bobot hidup minimal sebelum sapi dijual sebesar 250 kg. Hal ini memiliki konsekuensi peternak mitra tidak diperbolehkan menjual sapi dengan bobot badan di bawah 250 kg. Program tunda potong melalui penggemukan di Kabupaten Kupang dilaporkan mampu memberikan bobot badan tambahan mencapai 30-50% lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang dipotong di rumah potong hewan (Budiarsana et al. 2013). Oleh karena itu, kemitraan penggemukan tersebut dapat dikembangkan melalui program tunda potong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan pencapaian bobot potong yang optimal.

Pola kemitraan inti plasma yang diterapkan di NTT ini sangat berbeda dibandingkan dengan pola kemitraan yang sudah diterapkan di Indonesia. Dalam

pola kemitraan ini, petani berhak memperoleh keuntungan sebesar 70% dari SHU, sedangkan PUSKUD mendapatkan keuntungan 30% dari SHU. Persentase SHU yang diterima peternak plasma lebih besar dari pihak inti, agar dapat memperbaiki kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan peternak.

Pendapatan peternak ditentukan oleh harga sapi bakalan dan hasil penggemukan, serta biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses produksi (Rusdianto et al. 2015). Sementara itu, jumlah kumulatif SHU dari program kemitraan terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pola kemitraan antara peternak dan PUSKUD telah berjalan cukup baik dan mampu memberdayakan peternak di NTT, serta pihak plasma maupun inti patuh pada isi perjanjian dalam melakukan kegiatan kemitraan usaha penggemukan sapi Bali ini.

Hasil SHU yang diterima peternak dalam pengembangan usaha pola penggemukan tersebut dilaporkan mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga peternak. Dengan dukungan pendanaan dari lembaga sumber dana dan adanya aturan yang ringkas, jelas serta mudah dipahami, PUSKUD bersama peternak berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha pola gaduhan tersebut.

Dalam perkembangan program kemitraan inti plasma antara petani dan PUSKUD di lapang, karena kondisi tertentu dijumpai adanya sapi yang mati akibat penyakit dan sapi yang dijual paksa. Perkembangan sapi mati dan jual paksa dari tahun 2002-2014 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan sapi mati dan jual paksa tahun 2002-2014

Sumber: PUSKUD (2015) yang diolah

Jumlah sapi mati dalam program kemitraan ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Namun kemudian, mengalami penurunan secara signifikan

setelah tahun tersebut (Gambar 2). Metode pemeliharaan tradisional serta musim hujan singkat (empat bulan sepanjang tahun) ketersediaan hijauan pakan yang terbatas dan belum diadopsinya teknologi dalam usaha penggemukan diduga menjadi penyebab tingginya jumlah kematian sapi.

Kekurangan ketersediaan pakan pada musim kemarau mengakibatkan sapi menjadi kurus dan bahkan terjadi penurunan bobot badan. Efisiensi produksi sapi potong di lahan kering relatif rendah yang ditunjukkan dengan pertambahan bobot badan hariannya yang rendah sebagai akibat minimnya ketersediaan pakan hijauan (Nurdiati et al. 2012). Upaya pemberian pakan tambahan di NTT terkendala beberapa hambatan teknis diantaranya adalah: (1) Ketiadaan sumber bahan pakan tambahan di wilayah pedesaan; (2) Peternak tidak memiliki uang untuk membeli pakan tambahan; dan (3) Peternak tidak memiliki cadangan pakan dalam bentuk awetan (*hay* atau silase). Upaya pencapaian target dalam pola gaduhan sapi potong dapat dilakukan melalui perbaikan pada manajemen produksi, daya dukung hijauan pakan ternak dan pendampingan pada peternak (Ibrahim et al. 2016).

Di satu sisi, hasil inventarisasi jumlah ternak yang mati menurun secara signifikan, mulai tahun 2007 menunjukkan bahwa peternak sudah mulai bisa mengatasi berbagai hambatan dalam tatalaksana pemeliharaan, penanganan penyakit, sampai dengan upaya penyediaan pakan terutama saat musim kemarau. Demikian halnya kasus terjadinya jual paksa sapi potong dan kejadian kematian sapi di NTT adalah akibat faktor teknis seperti ketersediaan pakan dan manajemen pemeliharaan (Puslitbangnak 2007).

Dalam usaha penggemukan tersebut, terkadang dijumpai kondisi dimana peternak harus menjual paksa sapi sebelum mencapai bobot hidup yang dipersyaratkan (minimal 250 kg). Hal ini dilakukan peternak untuk menghindari kerugian yang lebih besar, diantaranya menjual paksa sapi yang sakit, walaupun persentase sapi yang dijual paksa dari tahun 2002-2014 mengalami fluktuasi yang kecil dibandingkan dengan terjadinya jumlah sapi mati. Jumlah sapi yang dijual paksa berdasarkan wilayah terlihat pada (Tabel 2).

Meskipun sapi yang dijual paksa mengalami fluktuasi yang tidak menentu, namun jumlah sapi jual paksa hanya sebesar 1,98% dari seluruh jumlah populasi dari program inti plasma sapi dari tahun 2002-2014. Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan jumlah jual paksa relatif lebih tinggi (2,03 dan 2,08%) dibandingkan dengan lokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu yang hanya mencapai (0,77 dan 0,91%).

Tabel 2. Jumlah sapi yang dijual paksa berdasarkan wilayah tahun 2002-2014

Kabupaten	Jumlah sapi dijual paksa (ekor)					Persentase dari total populasi (%)
	2002-2005	2006-2008	2009-2011	2012-2014	Jumlah	
Kupang	92	152	205	151	600	2,03
Timor Tengah Selatan	5	32	79	17	133	2,08
Timor Tengah Utara	1	1	5	-	7	0,77
Belu	-	3	6	-	9	0,91
Jumlah	98	188	295	168	749	1,98

Sumber: PUSKUD (2015) yang diolah

DAMPAK KEMITRAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN PETERNAK SAPI BALI

Pola kemitraan yang dilakukan PUSKUD melalui sistem bagi hasil pola penggemukan sudah mampu merintis pengembangan usaha yang ditunjukkan berkembangnya koperasi peternak dan mampu menumbuhkan kembangkan kelompok ternak. Pusat koperasi unit desa sebagai sebuah kelembagaan koperasi di daerah telah berupaya memberikan kesempatan pada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui pola gaduhan penggemukan berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PUSKUD difokuskan pada usaha agribisnis penggemukan sapi Bali sejak tahun 2002. Sapi Bali sudah berkembang di kawasan NTT dan terbukti memiliki kelebihan diantaranya mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah dan memberikan respon yang cukup baik dalam perbaikan pakan (Handiwirawan & Subandriyo 2004). Pola kemitraan tersebut telah terbukti mampu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja keluarga (Djaelani et al. 2009; Sonbait et al. 2011; Suardika et al. 2015).

Dalam mendukung keefektifan program kegiatan dari pola kemitraan, pihak PUSKUD telah menyediakan tenaga pendamping termasuk tenaga medis yang akan memonitor kegiatan penggemukan yang dilakukan pihak plasma (peternak), sehingga mampu terhindar dari kasus yang dapat merugikan peternak (khususnya kematian ternak). Pendampingan tersebut termasuk dalam hal penentuan penjualan sapi berdasarkan target bobot badan optimal dan penentuan waktu jual yang tepat sehingga dicapai harga tinggi.

Pusat koperasi unit desa telah menggunakan pendekatan kelompok untuk memperlancar realisasi pemberdayaan peternak dalam pola kemitraan, meskipun kontrak perjanjian dilakukan secara individu. Dengan demikian, setiap peternak yang mengikuti kegiatan kemitraan ini harus tergabung dalam kelompok. Peran kelompok peternak dalam pengembangan usaha adalah sebagai pionir bagi

intensifikasi dan diversifikasi usaha peternakan, khususnya dalam penggemukan sapi potong yang berwawasan agribisnis kerakyatan dan berdaya saing tinggi (Muhsis 2007).

Program kemitraan penggemukan sapi Bali, telah banyak membantu memberdayakan masyarakat NTT dalam meningkatkan nilai tawar, mulai dari adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penguasaan aspek teknis dan aspek ekonomis. Lama penggemukan sapi Bali selama 8-12 bulan dengan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia. Peternak hanya memberikan pakan hijauan (lokal) dan belum banyak yang memberikan pakan konsentrat sehingga menyebabkan tingginya variasi lama penggemukan yang dilakukan oleh peternak. Dengan pola kemitraan, peternak di NTT mampu memperoleh keuntungan tunai sebesar 1,6-1,7 juta/ekor/periode dan peternak binaan PUSKUD mampu memperoleh keuntungan mencapai 3-5 kali lipat dibandingkan dengan pola gaduhan dengan pedagang lokal (Budiansana et al. 2013).

Diperlukan pengamatan terhadap sifat-sifat dan parameter produktivitas sapi Bali yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai acuan untuk pengembangan model penggemukan sapi bali lebih lanjut (Jan et al. 2015). Pemberdayaan peternak di NTT melalui program ini mampu dilakukan secara sistematis, yang meliputi penyusunan strategi, mekanisme dan tahapan pelaksanaan. Usaha penggemukan sapi Bali dengan pola gaduhan sejak tahun 2002-2014 telah mampu memberdayakan peternak melalui peningkatan pendapatan peternak dan penyerapan tenaga kerja masyarakat berbasis sumber daya lokal di NTT.

KESIMPULAN

Dalam program kemitraan yang menempatkan pusat koperasi unit desa (PUSKUD) sebagai pihak inti dan peternak sebagai pihak plasma, yang telah dilakukan dari tahun 2002-2014 berjalan dengan baik dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jumlah peternak yang tergabung dalam kelompok peternak mengalami peningkatan dimana pada akhir tahun 2014 terdapat 4.881 peternak yang

tergabung dalam 183 kelompok ternak. Jumlah sapi Bali dari pengadaan sapi dan penjualan sapi penggemukan tahun 2002-2014 mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena minat masyarakat yang tinggi, daya dukung lahan, serta daya dukung pasar yang disiapkan oleh PUSKUD. Dalam perkembangannya, masih terjadi kematian sapi yang dipelihara peternak, maupun sapi yang dijual paksa terutama akibat terbatasnya pakan pada musim kemarau. Jumlah sisa hasil usaha yang diterima petani maupun PUSKUD cenderung meningkat setiap tahun. Program kemitraan penggemukan sapi Bali telah mampu memberdayakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada PUSKUD NTT dan Alm. Prof. (R) Dr. Ir. Kusuma Diwyanto, MS yang telah membantu menyediakan informasi dan data pendukung untuk penyelesaian makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2017. Statistik Indonesia 2016. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2017. Nusa Tenggara Timur dalam angka 2016. Kupang (Indonesia): Badan Pusat Statistik Povinsi Nusa Tenggara Timur.
- Budiarsana IGM, Handiwirawan E, Diwyanto K. 2013. Pemberdayaan peternak melalui kerjasama usaha penggemukan sapi Bali berbasis sumberdaya lokal di Kupang NTT. Dalam: Tiesnamurti B, Sawit MH, Damardjati DS, Thahir R, penyunting. Model pengembangan sistem integrasi tanaman-sapi berbasis inovasi. Jakarta (Indonesia): IAARD Press. hlm. 225-250.
- Ditjen PKH. 2017. Statistik peternakan 2016. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- Diwyanto K, Priyanti A. 2008. Keberhasilan pemanfaatan sapi Bali berbasis pakan lokal dalam pengembangan usaha sapi potong di Indonesia. *Wartazoa*. 18:34-45.
- Djaelani S, Widiati R, Santosa KA. 2009. Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore, Kepulauan Maluku Utara. *Bul Peternakan*. 33:40-48.
- Eaton C, Shepherd AW. 2001. Contract farming partnerships for growth. Rome (Italy): FAO Agricultural Services Bulletin 145.
- Firmansyah C, Kuswaryan S, Rahayu S. 2006. Manfaat finansial pada pola kemitraan usaha pembibitan sapi potong. *J Ilmu Ternak*. 6:75-80.
- Hadi PU, Ilham N, Thahar A, Winarso B, Vincent D, Quirke D. 2002. Improving Indonesia's beef industry. Canberra (AUS): ACIAR.
- Handiwirawan E, Subandriyo. 2004. Potensi dan keragaman sumber daya genetik sapi Bali. *Wartazoa*. 14:107-115.
- Hanifah VW, Diwyanto K. 2012. Pemberdayaan peternak sapi Bali melalui pola kemitraan di lahan kering iklim kering NTT. Dalam: Prosiding Seminar Nasional: Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi. Kupang, 12-14 September 2012. Bogor (Indonesia): BBP2TP.
- Ibrahim JT, Sutawi, Jayus. 2016. Analisis kinerja program pengembangan usaha sapi potong pola gaduhan sistem *revolving*. *Agrise*. 13:163-174.
- Jan R, Sudrana IP, Kasip LM. 2015. Pengamatan sifat-sifat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi pada sapi Bali di Kota Mataram. *J Ilmu Teknol Peternakan Indonesia*. 1:53-59.
- Kementerian Pertanian. 1997. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Jakarta (Indonesia): Kementerian Pertanian.
- Matondang RH, Talib C. 2015. Model pengembangan sapi Bali dalam usaha integrasi di perkebunan kelapa sawit. *Wartazoa*. 25:147-157.
- Mayangsari D, Prasetyo E, Mukson. 2014. Evaluasi kredit usaha peternakan sapi potong pada kelompok tani ternak. *J Econ Policy*. 7:14-21.
- Muhsis A. 2007. Peran kelompok peternak dan prospek usaha penggemukan sapi potong. Dalam: Darmono, Wina E, Nurhayati, Sani Y, Prasetyo LH, Triwulanningsih E, Sendow I, Natalia L, Priyanto D, Indraningsih, Herawati T, penyunting. Akselerasi Agribisnis Peternakan Nasional melalui Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 21-22 Agustus 2007. Bogor (Indonesia): Puslitbangnak. hlm. 17-20.
- Mullik M, Jelantik IGN. 2009. Strategi peningkatan produktivitas sapi Bali pada sistem pemeliharaan ekstensif di daerah lahan kering: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sapi Bali Berkelanjutan dalam Sistem Peternakan Rakyat. Mataram, 29 Oktober 2009. Mataram (Indonesia): BPTP NTB bekerjasama dengan Universitas Mataram dan Dinas Peternakan Provinsi NTB.
- Nalle MN. 2014. Pengaruh kredit terhadap produktivitas sapi potong di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur [Tesis]. [Bogor (Indonesia)]: Institut Pertanian Bogor.
- Nurdiati K, Handayanta E, Lutojo. 2012. Efisiensi produksi sapi potong pada musim kemarau di peternakan rakyat daerah pertanian lahan kering Kabupaten Gunung Kidul. *J Trop Anim Husb*. 1:52-58.

- Priyanto D. 2016. Strategi pengembalian wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai sumber ternak sapi potong. *J Penelitian Pengembangan Pertanian*. 35:167-178.
- Purwantho. 2012. Performans produksi dan reproduksi sapi Bali di Kaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok [Tesis]. [Malang (Indonesia)]: Universitas Brawijaya.
- PUSKUD. 2015. Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2002-2014. Kupang (Indonesia): Pusat Koperasi Unit Desa. Nusa Tenggara Timur. *unpublished*
- Puslitbangnak. 2007. Petunjuk teknis penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong. Bogor (Indonesia): Puslitbangnak.
- Rusdianto SW, Daryanto HKS, Kuntjoro, Priyanti A. 2015. Pengaruh perubahan harga sapi terhadap permintaan input dan penawaran output usaha penggemukan sapi Bali. *J Informasi Pertanian*. 24:223-232.
- Saptana, Ashari. 2007. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha. *J Penelitian Pengembangan Pertanian*. 26:126-130.
- Sonbait LY, Santosa KA, Panjono. 2011. Evaluasi program pengembangan sapi potong gaduhan melalui kelompok lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *Bul Peternakan*. 35:208-217.
- Suardika P, Ambarwati IGAA, Sudarma IM. 2015. Efektivitas kemitraan usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan petani-peternak di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J Manaj Agribisnis*. 3:155-162.
- Suryana. 2009. Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan. *J Penelitian Pengembangan Pertanian*. 28:29-37.
- Talib C, Enwistle K, Siregar A, Budiarti-Turner S, Lindsay D. 2003. Survey of population and production dynamics of Bali cattle and existing breeding programs in Indonesia. In: *Proceedings Workshop Strategis to Improve Bali Cattle in Eastern Indonesia*. Canberra (AUS): ACIAR. p. 3-9.
- Wirdahayati RB. 2010. Penerapan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas sapi potong di NTT. *Wartazoa*. 20:12-20.
- Zulfanita MA, Wiguna, Nurtini S. 2009. Evaluasi kelayakan usaha penggemukan sapi potong gaduhan di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. *Bul Peternakan*. 33:57-63.